

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA
BANJARMASIN**



Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi

Oleh :

SYIBLIA DEYA HAPSA

NIM : C1A114051

PROGRAM STUDI : ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2018

LEMBAR LEGALITAS

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA
BANJARMASIN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**SYIBLIA DEYA HAPSA
NIM. CIA114051**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Saipudin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19650713.199503.1.001

Penguji I,

Penguji II,



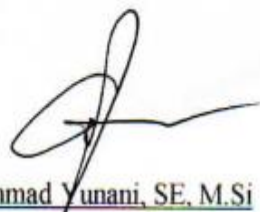
Chairul Sa Rodi, SE, M.Si
NIP. 1962081198811.2.001



Hj. Muzdalifah, SE, M.Si
NIP. 19560727.198503.2.001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si
NIP. 19730207.199903.1.003

LEMBAR PENGESAHAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
BANJARMASIN


Nama : Syiblia Deya Hapsa
NIM : C1A114051
Jurusan/Program Studi : S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin**
Mata Kuliah Pokok : Keuangan Daerah
Ujian Dilaksanakan : Rabu, 29 Agustus 2018

Tim Penguji

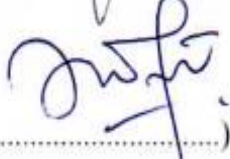
Pembimbing : Dr. Saipudin, SE, M.Si, Ak


(.....)

Penguji I : Chairul Sa'roni, SE, M.Si


(.....)

Penguji II : Hj. Muzdalifah, SE, M.Si


(.....)



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kotak Pos 29 Banjarmasin - 70123 Telp/Fax. (0511) 3305116 - (0511) 3306654
Laman : <http://www.fe.unlam.ac.id>

BERITA-ACARA

(UJIAN SKRIPSI UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI)

Pada hari ini R a b u tanggal **29 Agustus 2018**.....

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Surat Keputusan No. 1127.226/ UN8.1.12 / KP / 2018. tanggal **28 Agustus 2018** telah mengambil Ujian Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi atas ;

1. Nama calon : **SYBLIA DEYA HAPSA**
2. Nomor Mahasiswa : **C1A114051**
3. Tempat Ujian : **RUANG GB Lt.1A**
4. Ujian dilaksanakan : dari Jam **10.00 Wita**
s/ d Jam **12.00 Wita**
5. Hasil Ujian dengan nilai : **B +**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Banjarmasin, **29 Agustus 2018**

Tanda tangan calon,

SYBLIA DEYA HAPSA

PANITIA UJIAN

Penguji I

CHAIRUL SA'RONI, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. SAIPUDIN, SE, M.Si, Ak

Penguji II

Hj. MUZDALIFAH, SE, M.Si

Mengetahui / membenarkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H.M. RIZA FIRDAUS, SE, MM

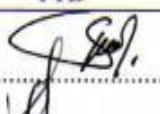

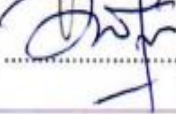
NIP. 19670909 199303 1 001

BERITA ACARA PERBAIKAN SKRIPSI

Berdasarkan hasil ujian yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat :

Nama : Syiblia Deya Hapsa
NIM : CIA114051
Jurusan/Program Studi : SI Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin
Hari/Tanggal : Rabu/29 Agustus 2018
Tempat : Ruang Sidang GBL1A
Waktu Ujian : 10.00 – 12.00 WITA

Dengan ini telah melakukan perbaikan skripsi berdasarkan saran Tim Penguji :

No	Nama	Keterangan	TTD
1.	Dr. Saipudin, SE, M.Si, Ak	Pembimbing	1. 
2.	Chairul Sa'roni, SE, M.Si	Penguji I	2. 
3.	Hj. Muszdalifah, SE, M.Si	Penguji II	3. 

Demikian berita acara perbaikan skripsi yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penguji.

Banjarmasin, 14 September 2018

Mahasiswa

Mengetahui
Ketua Jurusan IESP



Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si
NIP. 19730207.199903.1.003

Syiblia Deya Hapsa
CIA114051

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Segala kutipan dan bantuan dari berbagai sumber telah diungkapkan sebagaimana mestinya. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima akibat hukum dari ketidak benaran pernyataan tersebut.

Banjarmasin, 5 April 2019

Yang membuat pernyataan,

Syiblia Deya Hapsa

C1A114051

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Banjarmasin**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program sarjana S1 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa selama penyesunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada pihak yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini. Akhir dengan segala kerendahan hati, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis ini juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kelemahan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya yang di tunjukkan kepada:

1. Kepada orang tua saya Papah saya Muhammad suria, A.Md dan Mama Antung Gues Denayanti , Tante Antung Rizki Meina Ayu serta adik saya Shafa Alya Khansa yang telah memberikan banyak cinta dan kasih sayang serta Doa yang setiap hari , yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan selalu mendukung saya dalam pembuatan Skripsi ini.
2. Bapak DR. H. Muhammad Firdauz, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Binsnis Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak DR. H. Ahmad Yunani, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.

4. Bapak Ruddy Syafruddin, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan serta arahan tentang rencana studi untuk perkuliahan serta nasehat yang selalu beliau berikan kepada saya , Semangat dan Motivasi yang beliau berikan kepada saya.
5. Bapak Dr. Saipudin, SE,M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan Waktunya dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang bermanfaat.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya jurusan IESP atas bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada saya.
7. Teruntuk sahabat saya , Herly meilinda dan Umi Norawalia, Rafli, Anggit, Ricky , tommy, Risqy ,M.nor semua teman-teman seperjuangan Jurusan IESP angkatan 2014 dan Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi saya ini.
8. Untuk teman saya Jannah , Vivi serta teman-teman Monbebe yang telah membuat saya lebih semangat dalam mengikuti proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kelemahannya dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis tak lupa mengaharapkan dan kritik atas skripsi ini

ABSTRACT

Syiblia Deya Hapsa, (2018)*Factors Affecting Regional Expenditures in Banjarmasin City*. Supervisor I : Dr. Saipudin, SE, M.Si, Ak

This research was conducted to analyze the factors that influence Regional Expenditures in Banjarmasin City. With reference to the variable Regional Original Income (PAD), the Balancing Fund. In principle, the greater the contribution of PAD to expenditure will show the smaller regional dependence on the center. where regional expenditure can be influenced by PAD and Balancing Funds.

This research is located in the city of Banjarmasin, and the data used is secondary data consisting of times series data during the 2007 period. 2016 which is where the data is analyzed using a multiple linear regression model that is seeing from the magnitude of R^2 seen from the test of the coefficient of determination, testing the variables simultaneously (Test F) and partially (Test T). To find out whether the Regional Original Revenue affects Regional Expenditures and the Balancing Fund for Regional Expenditures in the City of Banjarmasin. The results of this study indicate that the variable Regional Revenue significantly affects Regional Expenditures, while the Balancing Fund does not have a significant effect on Regional Expenditures.

Keywords: Regional Expenditures, Regional Original Revenue and Balancing Funds

ABSTRAKSI

Syiblia Deya Hapsa, (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin. Pembimbing I : Dr. Saipudin, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Banjarmasin. Dengan mengacu dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap pengeluaran akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. dimana belanja daerah dapat dipengaruhi oleh PAD dan Dana Perimbangan.

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin, serta data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari data times series selama periode 2007 s.d. 2016 yang dimana data tersebut di analisis menggunakan model regresi linier berganda yaitu melihat dari besarnya R^2 dilihat dari uji koefisien determinasi, menguji variabel secara simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji T). Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata kunci: Belanja Daerah, Pendaptan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAPUL.....	i
LEMBAR LEGALITAS.....	ii
BERITA ACARA PERBAIKA SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRAC</i>	vii
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Otonomi Daerah.....	10
2.1.2. Belanja Daerah.....	12
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.4. Dana Perimbangan.....	15
2.1.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.1.5.1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	19
2.1.5.2. Hukum Wagner.....	19

2.1.5.3. Teori Peacock and Wiseman.....	20
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual	
3.1.1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah.....	27
3.1.2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.....	28
3.2. Hipotesis Penelitian.....	30

BAB IV METODELOGI PENELITIAN

4.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	31
4.2. Jenis Penelitian.....	31
4.3. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	32
4.4. Unit Analisis.....	32
4.5. Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	32
4.6. Teknik Pengumpulan Data.....	33
4.7. Teknik Analisis Data.....	34
4.8. Pengujian Determinasi (R^2).....	35
4.9. Pengujian Simultan (Uji F).....	37
4.10. Pengujian Parsial (Uji T).....	37

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

5.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	39
5.1.1. Letak Geografis.....	39
5.1.2. Wilayah Administrasi.....	41

5.1.3. Penduduk.....	41
5.1.4. Kondisi Perekonomian.....	42
5.1.5. Belanja Daerah.....	43
5.1.6. Pendapatan Asli Daerah.....	45
5.1.7. Dana Perimbangan.....	47
5.2 . Hasil dan Analisis.....	49
5.2.1. Koefisien Determinasi (uji R^2).....	49
5.2.2. Uji Simultan (F).....	51
5.2.3. Uji Partial (t).....	52
5.2.4. Analisis Hasil Regresi.....	54
5.3. Pembahasan.....	55
5.4. Keterbatasan.....	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	58
6.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Belanja Daerah di Kota Banjarmasin Tahun 2007 s.d. 2016.....	5
Tabel 1.2 Total PAD dan Dana Perimbangan di Kota Banjarmasin Tahun 7	
Tabel 5.1 Total Belanja Daerah di Kota Banjarmasin Tahun 2007 s.d. 2016.....	47
Tabel 5.2 Total Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin Tahun 2007 s.d. 2016.....	49
Tabel 5.3 Total Dana Perimbangan di Kota Banjarmasin Tahun 2007 s.d. 2016.....	51
Tabel 5.4 Hasil Uji R ²	2007
s.d. 2016.....	
.53	
Tabel 5.5 Hasil Uji F.....	54
Tabel 5.6 Hasil Uji T.....	56
Tabel 5.7 Hasil Regresi Variabel.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi adalah suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Kebijakan desentralisasi telah menjadi pilihan baik di Negara maju maupun Negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya tidak terkecuali di Indonesia (Hariyanto, 2005:56). Tahun Menurut Cardiman (2006) sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka paradigma keuangan antara pemerintah mengalami pergeseran. Implikasi terhadap terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim dalam (Rahmawati, 2010, p. 148) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebelum era otonomi daerah, struktur anggaran daerah (APBD) yang berlaku adalah anggaran berimbang, dimana anggaran penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja (Saragih, 2003). Di era otonomi daerah, struktur APBD mengacu pada pendapatan masing-masing daerah sehingga tiap-tiap daerah struktur APBD-nya akan berbeda dengan daerah lain tergantung dari kepastian keuangan yang dimilikinya ((Cardiman, 2006, p. 43).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran sector public maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dan pendapatan yang sah ((Rahmawati, 2010, p. 109)

Deddi Nurdiawan (2006) mengatakan bahwa yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak adanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga terdapat campur tangan dari pemerintah pusat di masa lalu hingga mengakibatkan terlambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat

meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan pemerataan, prinsip demokrasi, keistimewaan dan kekhususan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Suwandi dalam (Hariyanto, 2005, p. 44) salah satu argument dalam melaksanakan otonomi daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, (Halim, 2001, p. 14) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melakukan otonomi dan sentralisasi yaitu :

1. Kemampuan Keuangan Daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuaan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiyai penyelenggaran pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan ataupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialaokasikan sebagai pembiyaan belanja daerah.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat seminimal mungkin. Agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi abgian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Dwirandra, 2006) jadi, PAD harus menjadi basis utama penerimaan daerah dibandingkan dengan DAU agar daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya.

Hal ini dapat terlihat di Kota Banjarmasin, setiap daerah memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Setiap pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah atau yang lebih di kenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain komponen-komponennya terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan badan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan laba-laba yang sah.

Sebagai kosekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi , pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiyai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Akan tetapi ada fakta bahwa daerah tidak mampu membiyai pengeluaran baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung jika hanya mengandalkan dari sector Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan dalam keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan (Hariyanto, 2005).

Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur serta rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya (Rahmawati, 2010). Posisi keuangan daerah dapat di lihat dari APBD, yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta penegluaran daerah untuk membiyai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran.

Berikut ini akan disajikan mengenai jumlah belanja daerah Kota Banjarmasin dari tahun 2007– 2016.

Table 1.1
Total Belanja Daerah Di Kota Banjarmasin Tahun 2007 – 2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah (Rp)
2007	203.996.58
2008	487.549.12
2009	518.158.83
2010	519.445.00
2011	557.788.00
2012	683.174.16
2013	718.131.03
2014	966.998.00
2015	1.369.261.00
2016	1.469.417.92

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Banjarmasin

Dapat kita lihat berdasarkan tabel di atas menunjukkan, bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2007 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan jumlah belanja daerah di kota Banjarmasin. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah di kota Banjarmasin memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat pada setiap tahunnya.

Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dan digunakan untuk membiyai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Warsito dalam Rahmawati (2010) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Halim dalam Rahmawati (2010) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan serta langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan serta belanja modal.

Belanja daerah di masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam mengambil sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat. Berikut akan di sajikan mengenai PAD, Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan tahun.

Table 1.2
Total PAD dan Dana Perimbangan di Kota Banjarmasin
Periode tahun 2007 -2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PAD (Rp)	%	Dana Perimbangan (Rp)	%
2007	45.572.94	0,37	394.693.21	1,29
2008	62.555.36	3,8	445.675.86	1,49
2009	64.994.80	4,2	509.325.68	1,19
2010	67.765.38	1,58	570.350.78	5,02
2011	57.007.00	1,38	442.371.00	-2,24
2012	84.830.64	6,23	664.770.00	3,82
2013	138.086.00	5,67	548.643.00	-1,74
2014	216.427.65	4,35	758.384.00	1,10
2015	225.821.05	9,4	842.336.75	6,95
2016	247.258,42	1,74	848.197.80	3,12

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan Tabel 1.2 memperlihatkan kecenderungan meningkat dari periode tahun tahun 2011 hingga 2016 pada PAD dan Dana Perimbangan. Kedua potensi tersebut memiliki kecenderungan pada tren yang semakin meningkat dari

tahun ke tahun. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap pengeluaran akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat (Edison,2006). Hal ini tidak terlihat dalam tabel 1.2 dimana perkembangan PAD lebih kecil dibandingkan dana Perimbangan yang selalu mengalami peningkatan secara signifikan. Jadi sumbangan antara PAD dan Dana perimbangan terhadap belanja daerah cenderung lebih dominan dipengaruhi oleh dana Perimbangan.

Berdasarkan kondisi dan latar belakang masalah tersebut dimana belanja daerah dapat dipengaruhi oleh PAD dan Dana Perimbangan adanya pemikiran tersebut, maka dalam rangka penyusunan skripsi ini dipilih judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Kota Banjarmasin*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah pembiayaan belanja daerah dengan PAD dan Dana Perimbangan memiliki sambungan yang sangat signifikan dibandingkan PAD. Sebagaimana pendapat Edison (2006) prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap pengeluaran akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Berdasarkan pada rumusan tersebut, maka pernyataan untuk penelitian analisis belanja daerah di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan adalah :

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap belanja daerah ?

2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja daerah.
2. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh dari variable PAD dan Dana Perimbangan dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Kota Banjarmasin dari periode tahun 2007 sampai dengan 2016, dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan terutama pemerintah daerah.
3. Menambah khasanah ilmu tentang menganalisa suatu masalah dalam hal ini tentang APBD.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara rinci tentang penelitian ini, maka hasil penelitian ini disajikan dalam enam bab. Adapun uraian garis besar dari masing-masing bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari latar belakang didalamnya penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dari penelitian serta manfaat dari penelitian secara teoritis maupun praktis. Pada bagian akhir ini bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi antara lain, tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang dimiliki korelasi dengan penelitian ini.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kerangka dari permasalahan yang ada yaitu membuat kerangka pikir serta pembahasannya dan membuat hipotesis penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan variabel penelitian serta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data dan metode analisis yang digunakan.

BAB V HASI PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan diuraikan beberapa hal, antara lain : deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Pada era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian setiap daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing.

Untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat tersebut, memerlukan suatu instrument kebijakan. Instrument kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintahan daerah dalam 1 (satu) periode APBD memuat segala bentuk penerimaan dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter ataupun rupiah.

Sumber-sumber penerimaan sebagaimana yang telah dijelaskan di UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah

- c. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu :
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - c. Dana Bagi Hasil
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

2.1.2 Belanja Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja di laksanakan oleh suatu pemerintah daerah tetapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Pada ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 telah di atur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rinciannya bias dibagi dalam dua bentuk berdasar sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonomisnya belanja daerah terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, hibah dan bantuan social. Sedangkan berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas

umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan social.

Pada hakikatnya pengeluaran pemerintah daerah menyangkut dua hal (anggaran *line item*), yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran rutin, seperti pembayaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain. Anggaran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak disangka.
2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sector pertanian, industry, perhubungan, pariwisata dan sector-sektor yang lain.

Adanya perubahan tentang stuktur pengeluaran pemerintah daerah (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) di terangkan sebagai berikut :

1. Belanja aparatur daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang di alokasikan pada atau digunakan untuk membiyai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarkat (publik).
2. Belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiyai kegiatan yang hasil manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Kemudian perubahan tentang stuktur pengeluaran pemerintah daerah (Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006) dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan Undang-Undang, belanja bunga,, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan.
2. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah di anggrarkan oleh pemerintah daerah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan sumber-sumber dari PAD, namun PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatau daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam meningkatkan otonomi suatau daerah (Hariyanto, 2005).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim,2001):

1. Pajak Daerah merupakan Pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendapatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah dirinci menjadi :
 - a. Pajak Provinsi Pajak ini terdiri atas (i) Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,(ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBKNB) dan kendaraan di atas air,(iii) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri dari (i) Pajak Hotel,(ii) Pajak Restoran , (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
 - c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi.(i) Retribusi Jasa Umum,(ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perjanjian tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini terdiri dari objek pendapatan berikut :
 - a. Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - b. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
 - c. Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Pendapatan lain-lain yang sah, di lain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan itu antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan dan menghasilkan baik yang berupa materi dalam kegiatan bersifat bisnis, maupun non materi dalam hal kegiatan tersebut untuk menyediakan ,malapangan atau memantapkan status kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana Perimbangan meliputi dana alokasi umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah di tentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang berpotensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan akan memperoleh alokasi DAU relative kecil. Sebaliknya, daerah yang berpotensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh Alokasi DAU relative besar, secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai factor pemerataan kapasitas fiskal DAK dimaksudkan untuk membantu membiyai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiyai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pemabangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) di maksudkan untuk membantu membiyai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiyaikebutuhan sarana dan prsarana pelayanan dasar masyarAakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyalarsan dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan bagi hasil pemungutan pajak.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan prentase untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahny, meliputi pnerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perorngan (PPh perseorangan), pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Pembangunan (BPHTB), dan penerimaan sumber daya.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara. Arti pertumbuhan sendiri secara umum adalah ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan. Dari sini, bisa dipahami pula bahwa pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai dalam perkembangan suatu perekonomian. Adanya perkembangan ini dapat dilihat dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

Pengertian PDB sendiri adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun, termasuk pula yang dihasilkan warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut.

Karenanya, pertumbuhan ekonomi dapat pula diartikan sebagai keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB suatu negara bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Berbeda dengan pembangunan ekonomi, perhitungan untuk pertumbuhan ekonomi ini mengabaikan apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang ada. Perhitungan perkembangan ekonomi juga tidak memandang ada atau tidaknya perubahan dalam struktur perekonomian.

Para ahli ekonomi sudah lama sejak lama berusaha untuk memahami konsep ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yakni teori klasik, teori Neoklasik, teori Neokeynes, teori WW Rostow, dan teori Karl Bucher.

2.1.5.1 Teori Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Klasik ini dikembangkan sejak abad ke-17. Ada dua tokoh yang paling berpengaruh terhadap pemikiran Ekonomi Klasik yakni, Adam Smith dan David Ricardo.

1. teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Adam Smith membahas mengenai teori ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Menguraikan pendapat tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan

ekonomi melalui dua faktor, yakni Output dan Faktor Pertumbuhan Penduduk.

2. teori pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang paling penting yang dikenal tentang *The Law of Diminshing Return*. Pemikirannya ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja yang mampu mempengaruhi penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. Menurutnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

2.1.5.2 Teori Neoklasik

Dalam teori Neoklasik pertumbuhan ekonomi, terdapat dua tokoh yaitu Joseph A Schumpeter dan Robert Solow.

1. teori pertumbuhan ekonomi menurut Joseph A Schumpeter dalam bukunya yaitu *The Theory of Economic Development*, buku tersebut berisi tentang peran pengusaha dalam pembangunan suatu negara. Schumpeter berpendapat bahwa dasar dari proses pertumbuhan ekonomi ialah proses inovasi yang dilakukan oleh para innovator dan wiraushawaan.
2. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Robert Solow ialah uutan kegiatan ekonomi berasal dari empat faktor yaitu , manusia , akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

2.1.5.3 Teori Neokeynes

Dalam teori Neokeynes, dikenal dua tokoh yaitu Roy F Harrod dan Evsey D Domar. Pandangan kedua tokoh tersebut adalah tentang adanya pengaruh investasi terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan kapitas produksi. Sebab, investasi inilah yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori Neokeynes ini memiliki pandangan bahwa penanaman modal adalah komponen sangat utama dalam proses penentuan suksesnya pertumbuhan ekonomi.

2.1.5.4 Teori W.W Rostow

WW Rostow banyak membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori pembangunan . berbagai pemikirannya dituangkan dalam salah satu buku yang berjudul *The Stages of Economic, A Non Communist Manifesto*. Dalam buku tersebut, Rostow menggunakan pendekatan sejarah untuk menjabarkan proses perkembangan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat. Menurutnya dalam suatu masyarakat, proses pertumbuhan ekonom tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan meliputi, Masyarakat Tradisional, Tahap Prasyarat Tinggal Landas, Tahap Tinggal Landas, Tahap Menuju Kedewasaan, dan Tahap Kosumsi Tinggi.

2.1.5.5 Teori Karl Bucher

Karl Bucher berpendapat mengenai tahapan perkembangan ekonomi yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bucher adalah :

1. produksi untuk kebutuhan sendiri.
2. perekonomian sebagai bentuk perluasan pertukaran produk di pasar.
3. Perekonomian nasional dengan peran perdagangan yang semakin penting.
4. Kegiatan perdagangan yang telah meluas melintasi batas negara.

2.1.6 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah akan mempengaruhi belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend* hipotesis. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran (Bambang Prakoso, 2004).

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, Dana Perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir decade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh *grants* dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih 30 tahun (Bambang Prakoso, 2004)

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan pendapatan Asli daerah ini sekalipun dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Rahmawati,2010).

Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin tinggi Daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

2.1.7 Pengaruh Dana perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi.

Dalam literature ekonomi dan keuangan daerah hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir decade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh *grants* dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, 2004), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dan pemerintah pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Penelitian sebelumnya Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Dimana pengaruh tersebut memiliki pengaruh yang positif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Nur Indah Rahmawati (2009)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan, Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah	Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 daerah di Jawa Tengah yang bersumber dari laporan Realisasi Anggaran PAD dan Belanja Daerah dari tahun 2007 sampai 2009	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan mempunyai Pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah jika dilihat lebih lanjut tingkat ketergantungan Belanja Daerah Dominan Terhadap PAD daripada Dana Perimbangan
Kesit Bambang	Pengaruh DAU	Metode penelitian ini	Hasil Penelitian ini

Prakosa (2009)	dan PAD Terhadap Prediksi Belanja Daerah, Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	menggunakan data panel dengan pendekatan Randon effect model	menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Stevani Uhise (2013)	Dana Alokasi Umum Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening	Metode penelitian yang digunakan adalah Asosiatif dengan statistik Uji Analisis Jalur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah
Agung Priambodo (2013)	Analisis Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota di Jawa Tengah 2008-2012	Metode analisis yang digunakan dalam penelian adalah menggunakan regresi data panel model efek tetap dengan metode <i>Generalized Lest Square</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Tenaga Kerja berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.1 PENELITIAN SEBELUMNYA

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL dan HIPOTESIS

1.1 Kerangka Konseptual`

Penelitian ini penulis memaparkan kerangka pikir penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur berpikir dalam melihat pengaruh variable, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dalam PDRB , apakah dapat mempengaruhi variabel tersebut yaitu belanja daerah di Kota Banjarmasin.

3.1.1 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah akan mempengaruhi belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama tax spend hipotesis. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran (Bambang Prakoso, 2004).

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 55 tahun 2005, Dana Perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi(Rahmawati,2010).

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir decade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh grants dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih 30 tahun (Bambang Prakoso, 2004)

Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin tinggi Daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

3.2.1 Pengaruh Dana perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi.

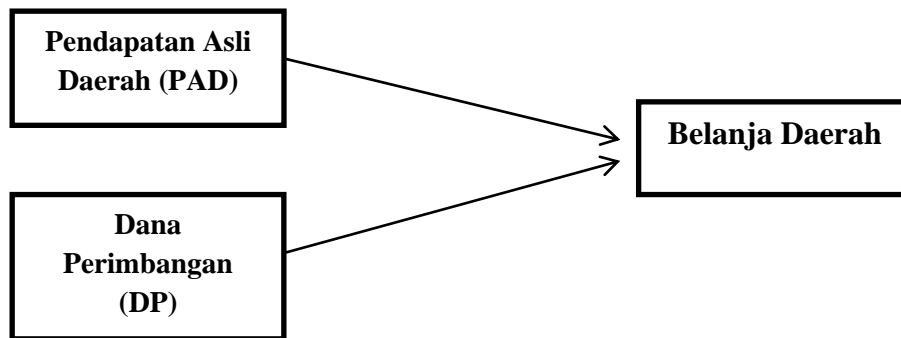
Dalam literature ekonomi dan keuangan daerah hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir decade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh grants dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, 2004), menyatakan bahwa

terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dan pemerintah pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah

Adapun untuk skema dari Variabel-Variabel penelitian pada gambar 2.2 Analisis belanja daerah di Kota Banjramsing sebagai berikut.

Gambar 2.2

Skema Kerangka Pikir Analisis Belanja Daerah



Keterangan :

Y = Belanja Daerah

X1= Pendapatan Asli Daerah

X2= Dana Perimbangan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian analisis belanja dirumuskan sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

BAB V

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Perimbangan (PD) berpengaruh terhadap Belanja daerah di Kota Banjarmasin.

4.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode pengumpulan data dimana data yang diperlukan akan penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Sifat datanya adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka dan bersifat obyektif. Data kuantitatif terdiri dari Belanja Daerah PAD dan Dana Perimbangan. Data *time series* yang digunakan dimulai dari periode 2007 sampai dengan 2016 (10 tahun).

4.3 Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

4.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (PD) dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan selatan yaitu di Kota Banjarmasin.

4.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan belanja daerah sebagai variable dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD dan Dana Perimbangan.

Definisi operasional variabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan didaerah tersebut. Data yang digunakan yaitu data dalam rangka menurut Kota di Banjarmasin dengan satuan rupiah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya.

Data yang digunakan adalah dalam angka menurut Kota Banjarmasin dengan satuan hitung rupiah.

3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program ekonomi. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan adalah data dalam angka menurut Kota Banjarmasin dengan satuan rupiah.

4.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Menurut (Sugioyono,2013;45) adalah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada pada situasi social yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian ini, di karenakan penelitian tidak lepas dari literature-literatur ilmiah.

Dengan mencatat atau menyalin dan membaca dari literature yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang berkaitan dengan objek penelitian serta data-data yang terpercaya dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.

4.7 Teknik Analisis Data

Sesuai tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini menggunakan analisis Time series, yang merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu misalnya, harian, bulan dan tahunan. Data time series juga sangat berguna bagi pengambil keputusan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Karena diyakini pola perubahan data runtun waktu beberapa periode masa lampau akan kembali terulang pada masa kini.

Adapun hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat ditulis sebagai berikut

$$Y = f (X_1, X_2, X_3 \dots (X_n))$$

Dengan menggunakan persamaan linier berganda, maka persamaan diatas ditulis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Dimana :

Y = Belanja Daerah

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pendaatan Asli Daerah (rupiah)

X_2 = Dana Perimbangan (Rupiah)

μ = *Disturbance Error* atau kesalahan pengganggu pada persamaan linier.

4.7 Time Series

Time series atau runtun waktu adalah himpunan observasi data terurut dalam waktu (Hanke&Winchern, 2005: 58). Metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan dipikirkan dengan variabel waktu. Peramalan suatu data time series perlu memperhatikan tipe atau pola data. Secara umum terdapat empat macam pola data time series, yaitu horizontal, trend, musiman, dan siklis (Hanke dan Wichren, 2005: 158). Pola horizontal merupakan kejadian yang tidak terduga dan bersifat acak, tetapi kemunculannya dapat memepengaruhi fluktuasi data time series. Pola trend merupakan kecenderungan arah data dalam jangka panjang, dapat berupa kenaikan maupun penurunan. Pola musiman merupakan fluktuasi dari data yang terjadi secara periodik dalam kurun waktu satu tahun, seperti triwulan, kuartalan, bulanan, mingguan, atau harian. Sedangkan pola siklis merupakan fluktuasi dari data untuk waktu yang lebih dari satu tahun.

4.8. Pengujian Determinasi (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen untuk mengukur kebaikan suatu model dengan digunakan koefisien determinasi. Determinasi ini menjelaskan seberapa besar variasi Y yang dapat di jelaskan oleh variabel terikat (X). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut :

$$K_d = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

K_d = Nilai Koefisien determinasi

R = Nilai Koefisien korelasi

4.8.1. Pengujian Simultan (uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistic bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu belanja tidak daerah, dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = 0$$

$$H_1 : \beta_0 \quad \beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \dots \quad 0$$

Kriteria pengujiannya apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu.

4.8.2. Pengujian Parsial (Uji T)

Merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Hipotesis pada uji t yaitu $H_0 : B_i \neq 0$. Artinya variabel dependen ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk menentukan uji t, keputusan yang diambil yaitu dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel pada kepercayaan 5%. Jika t dihitung lebih kecil dari tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dan sebaliknya jika t dihitung lebih besar t besar t maka H_0 dan H_1 diterima (Gani,2015).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

5.1.1 Letak Geografis

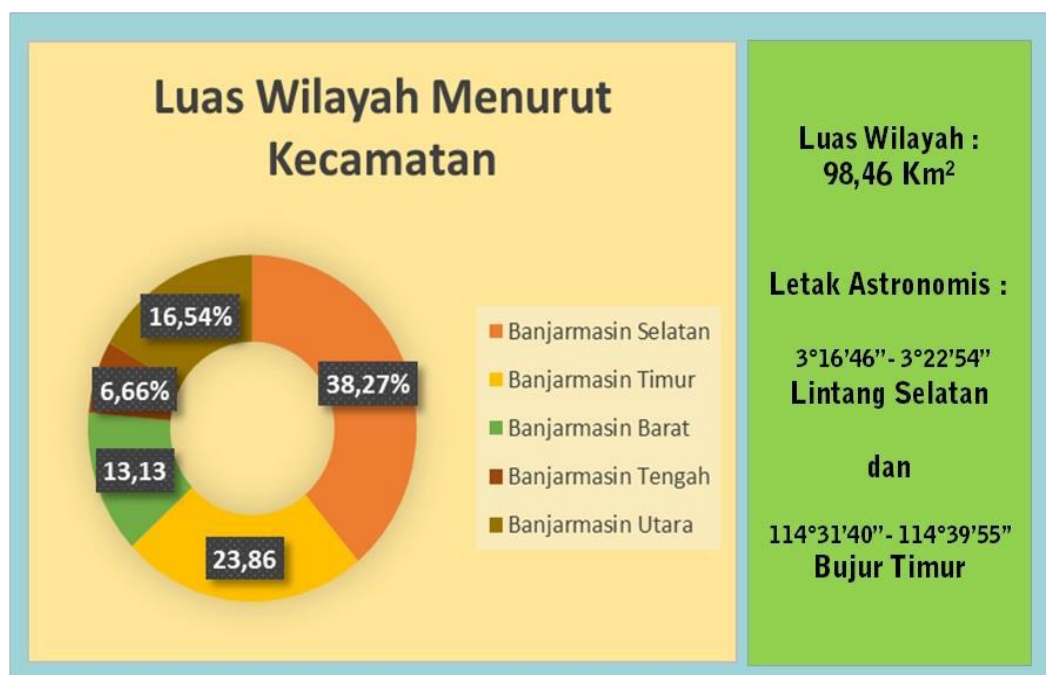
Kota Banjarmasin secara Geografis terletak antara $3^{\circ}16'46''$ sampai dengan $3^{\circ}22'54''$ lintang selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ bujur timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya dan relative datar. Pada waktu air pasang seluruh wilayah digenangi air.

Kota Banjarmasin berada disebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan:

- Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala.
- Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar.
- Di sebelah Selatan dengan Kabupaten Barito Kuala.
- Di sebelah Selatan dengan Kabupaten Banjar.

Sesuai dengan kondisinya kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain jalan darat yang sudah ada. Selain itu masyarakat masih memanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari.

Kota Banjarmasin memiliki lima Kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara serta memiliki 52 Kelurahan.



Luas wilayah menurut Kecamatan di kota Banjarmasin (km^2) 2016

Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan di belah dua oleh Sungai Martapura. Sehingga seolah-olah Kota Banjarmasin menjadi 2 bagian. Kemiringan tanah antara 0.13%. Luas kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan , terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang terluas dengan persentase sebesar 38,87 % (38,27) km^2 . Kota Banjarmasin di sebut sebagai Kota Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang melintasi di wilayah Kota Banjarmasin. Sungai terpanjang yang melinasi kota banjarmasin adalah sungai Martapura dengan Panjang 26.066 meter.

5.1.2 Wilayah Administrasi

Kota Banjarmasin terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.

Keputusan Walikota Banjaramsin Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penetapan Daerah Kota Banjarmasin dan Pembentukan Kecamatan Banjarmasin tengah, kemudian di kuatkan dengan peaturan Daerah Kota Banjaramsin Nomor 2 Tahun 2001 tentang penataan Daerah Kota Banjarmasin, kota yang terdiri dari % kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur. Pada tahun 2016 jumlah kelurahan di Kota Banjarmasin sebanyak 52 kelurahan yang terbagi menjadi 117 Warga dan 1.570 Rukun Tetangga.

5.1.3 Penduduk

Pada tahun 2016, rasio jenis kelamin di Kota Banjarmasin sebesar 100,36. Hal ini dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan walaupun selisihnya cenderung kecil. Berdasarkan wilayah kecamatan, maka hampir sekitar 45,51% penduduk Kota Banjarmasin berdiam di kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara dengan tingkat pendapatan penduduk terbesar pada kecamatan Banjarmasin Tengah yang mencapai 14,295 jiwa/km².

Penduduk Kota Banjarmasin di dominasi oleh kelompok umur usia muda dimana kelompok umur 0-4 tahun merupakan terbanyak yaitu sekitar 9,70 % dari total

seluruh dari total penduduk Kota Banjarmasin. Jika dilihat dari tahun 0-29 tahun, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada kelompok umur tersebut berjumlah 360.903 atau lebih dari setengah total penduduk Kota Banjarmasin (52,94 persen).

5.1.4 Kondisi Perkenomian

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang juga sebagai pusat perdagangan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Perekonomian Kota Banjarmasin tahun 2016 tumbuh sebesar 6,28 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Pendidikan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,28 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,93 persen, kemudian Informasi dan Komunikasi sebesar 8,43 persen. Jika dilihat berdasarkan sumber pertumbuhannya, angka pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin sebesar 6,28 persen tersebut bersumber dari Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,85 persen, Industri Pengolahan sebesar 0,73 persen, sementara 3,7 persen sisanya berasal dari 13 lapangan usaha lainnya. Struktur perekonomian Kota Banjarmasin menurut lapangan usaha tahun 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan (18,09 persen), Jasa Keuangan (13,04 persen); kemudian Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,52 persen). Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin 2016 Ketiga lapangan usaha ini selalu berperan besar dalam perekonomian Kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir.

5.1.5 Belanja Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja di laksanakan oleh suatu pemerintah daerah tetapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Pada ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 telah di atur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rinciannya bias dibagi dalam dua bentuk berdasar sifat dan berdasar fungsinya.

Tabel 5.1
Total Belanja Daerah Di Kota Banjarmasin tahun 2007 – 2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah (rupiah)	Kenaikan	%
2007	203.996.58	203.597.54	1,38
2008	487.549.12	30.609.71	6,23
2009	518.158.83	38.343.00	7,40
2010	519.445.00	1.286.17	2,54
2011	557.788.00	125.386.16	2.24
2012	683.174.16	34.956.87	5,11
2013	718.131.03	248.866.97	3.46

2014	966.998.00	402.263.00	4,16
2015	1.369.261.00	100.156.92	7,41
2016	1.469.417.92	-	2,62

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Banjarmasin

Dapat kita lihat pada tabel 5.1 yang diperoleh instansi terkait menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah daerah dari tahun ke tahun selama periode 10 tahun yaitu dari 2007 hingga 2016 terjadi peningkatan jumlah Belanja Daerah di Kota Banjarmasin. Dapat kita lihat dari tabel 5.1 bahwa dari tahun 2007 yaitu sekitar 203.996.58 rupiah yang mengalami kenaikan sebesar 30.609.71 rupiah atau sekitar 6,23% ,sedangkan kenaikan tertinggi itu terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yaitu 966.998.00 di tahun 2014 dan 1.369.261.00 atau mengalami kenaikan sebesar 402.263.00 yaitu sekitar 4,16 % dan kenaikan 100.156.92 rupiah atau 7,41 % dari tahun sebelumnya yaitu 718.131.03 rupiah di tahun 2013, sedangkan di tahun 2010 adalah tahun yang paling sedikit kenaikkan yaitu sekitar 1.286.17 rupiah atau sekitar 2,41%. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin Memiliki kegiatan Pembangunan dan Perekonomian Daerah yang di peroleh dan di pergunakan untuk membiyai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

5.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan sumber-sumber dari PAD, namun PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para

ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam meningkatkan otonomi suatu daerah (Hariyanto, 2005).

Tabel 5.2
Total PAD di Kota Banjarmasin
Tahun 2007 – 2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (rupiah)	%
2007	45.572.94	0,37
2008	62.555.36	3,8
2009	64.994.80	4,2
2010	67.765.38	1,58
2011	57.007.00	1,38
2012	84.830.64	6,27
2013	138.086.00	5,67
2014	216.427.65	4,35
2015	225.821.05	9,4
2016	247.258,42	1,74

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Dapat kita lihat dari tabel 5.2 memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin memperlihatkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya dapat kita lihat pada tahun 2007 jumlah Pendapatan Asli Daerah itu adalah 45.572.94 rupiah yaitu sekitar 0,37%, di tahun 2008 mengalami peningkatan sekitar 62.555.36 atau sekitar 3,8% yang di susul pada tahun-tahun berikutnya yaitu di tahun 2009 64.994.80 rupiah dan 2010 67.765.38 yaitu sekitar 4,2 % di tahun 2009 dan 1.58% di tahun 2010, namun pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah mengalami menurun dari 64.994.80 menjadi 57.007.00 rupiah yaitu sekitar 1,3%, namun pada tahun-tahun selanjutnya kembali mengalami peningkatan di tahun 2012 yaitu sebesar 84.830.64 rupiah sekitar 6,27% , di tahun 2013 dan 2014 yaitu sekitar 138.086.00 rupiah dan 216.427.65 rupiah atau sekitar 5.67 di tahun 2013 dan 4,34% di tahun 2014, dan Pendapatan

terbesar terjadi di tahun 2015 dan 2016 yaitu sekitar 225.821.05 rupiah dan 247.258.47 rupiah yaitu sekitar 11.14%. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun, dikarenakan pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap pengeluaran akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah ke pada pemerintah pusat (Edision, 2006).

5.1.7 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana Perimbangan meliputi dana alokasi umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Tabel 5.3
Total Dana Perimbangan Kota Banjarmasin
Tahun 2007-2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan (rupiah)	%
2007	394.693.21	1,29
2008	445.675.86	1,42
2009	509.325.68	1,19
2010	570.350.78	5,02
2011	442.371.00	-2,24
2012	664.770.00	3,82
2013	548.643.00	-1,74
2014	758.384.00	1,10
2015	842.336.75	6,95
2016	848.197.80	3,12

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Dapat kita lihat pada tabel 5.3 bahwa Dana Perimbangan di Kota Banjarmasin cenderung Meningkat setiap tahunnya pada tahun 2007 Dana Perimbangan Yaitu sekitar 394.693.21 sekitar 1,29 % dan pada tahun 2008 Dana perimbangan sekitar 445.67.86 atau sekitar 1,42% dan di tahun 2009 dan 2010 Dana Perimbangan naik dari 509.325.68 dan 570.350.78 yaitu sekitar 6,21% , namun pada tahun 2011 dan 2013 mengalami penurunan yang awalnya 570.350.78 menjadi 442.371.00 dan di tahun 2012 yang awalnya 664.770.00 menjadi 548.643.00 yang berarti di tahun 2011 mengalami penurunan -2,24 % dan -1,74 % di tahun 2013 hal ini di sebabkan karena adanya koreksi atas DAU dari pemerintah pusat. Namun pada tahun selanjutnya Dana Perimbangan kembali meningkat yaitu pada tahun 2014 sekitar 758.384.00 atau naik sekitar 1,10% , sedangkan pada tahun 2015 yaitu meningkat menjadi 842.336.75 yaitu sekitar 6,95% sedangkan pada tahun 2016 adalah sekitar 848.197.80 atau sekitar 3,12% dan rata-rata kenaikan Dana Perimbangan selama 10 tahun adalah 11,49%.

5.2 Hasil dan Analisis

Hasil analisis regresi pada penelitian ini adalah menguraikan mengenai variabel dependen yaitu Belanja Daerah sebagai variabel terikat yang di pengaruhi oleh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan sebagai variabel bebas. Model akan dianalisis untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program komputer SPSS dengan memasukkan setiap variabel-variabel yang ada maka di peroleh hasil sebagai berikut :

5.2.1 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji R^2 dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dan untuk mengetahui seberapa kuat dan baik model yang sudah didapatkan dari pengolahan data. Nilai yang mendekati suatu variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dapat kita ketahui dari tabel 5.4 yang merupakan hasil dari Uji R^2 dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS dengan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan sebagai variabel independen dan Belanja Daerah sebagai Variabel dependen maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.4 Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimaste
1	.986^a	.973	.966	8207373,112

a. Predictors : (constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependen Variabel: Belanja Daerah

Dilihat dari hasil regresi pada tabel 5.4 yaitu dapat di ketahui bahwa pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap variabel dependen Belanja Daerah diperoleh R^2 (R-Square) sebesar 0.973 persen hal ini berarti sebesar 97,3 persen variasi faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah dapat di jelaskan oleh dua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lalu sisanya sebesar 9,73 persen atau sebesar 9,73 Milyar dipengaruhi oleh variabel lainnya.

5.2.2 Uji Simultan (F)

Uji Simultan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas/prediktor terhadap variabel terikat/respon dari simultan. Pada regresi linier berganda, kondisi yang diharapkan adalah menerima hipotesis H_1 . Hipotesis H_1 diterima apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($F_{df1,df2 (\alpha)}$) atau nilai signifikan lebih kecil dari alpha 5% (0,05), untuk menghitung Ftabel digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= \alpha ; (k - 1), (n - k) \\ &= 0,05 ; (2 - 1), (10 - 2) \\ &= 0,05 (1,8) \\ &= 5,32 \end{aligned}$$

Dapat dilihat dari tabel berikut mengenai pengujian secara bersama atau simultan yang menunjukkan ringkasan hasil analisis pengujian F-statistik dengan menggunakan program komputer SPSS dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan sebagai variabel bebas dan Belanja Daerah sebagai variabel terikat yaitu :

Tabel 5.5 Hasil Uji F

ANNOVA^a

Model	F	Sig
Regression 1 Residual Total	143.555	.000 ^b

Dapat dilihat dari tabel 5.5 nilai Fhitung 143,555 lebih besar dari nilai Ftabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$). Maka

berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi, hipotesis penelitian dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Belanja Daerah.

5.2.3 Uji Partial (t)

Uji T dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung pada tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 5% (0,05) dengan $df = n-k$. Untuk menghitung t tabel dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$T_{\text{tabel}} = \alpha / 2; (n - k)$$

$$= 0,025 ; (10 - 2)$$

= 0,025; 8 (dengan pengujian dua sisi (signifikan 0,025) maka hasil yang di peroleh untuk T_{tabel} yaitu sebesar 2,306

Keterangan :

$$\alpha = 0,025$$

n = Banyaknya Tahun

k = Jumlah variabel yang digunakan

Tabel berikut menunjukkan ringkasan hasil analisis pengujian T-statistik dengan menggunakan program komputer SPSS dengan data Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan sebagai variabel independen dan Jumlah Belanja Daerah sebagai variabel dependen :

Tabel 5.6
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	T	Sig.
(constant)	.612	.557
Pendapatan Asli Daerah	-5,327	.001
Dana Perimbangan	.441	.671

a. Dependent Variabel : Belanja Daerah

Berdasarkan hasil output SPSS diatas dapat dilihat dimana :

- a) Nilai t_{hitung} variabel Pendapatan Asli Daerah Lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} ($-5,327 < 2,306$) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,01 ini berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Belanja Daerah.
- b) Nilai t_{hitung} variabel Dana Perimbangan lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($0,441 < 2,306$) dengan tingkat signifikan di atas 0,05 yaitu 0,671 hal ini berarti Dana Perimbangan sebagai Variabel Bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu Belanja Daerah.

Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji parsial dalam analisis regresi berganda maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap banyaknya Belanja Daerah di Kota Banjarmasin.

2. Variabel Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap banyaknya jumlah Belanja Daerah di Kota Banjarmasin.

5.2.4 Analisis Hasil Regresi

Tabel 5.7 Hasil Regresi Variabel

Model	Nilai Koefisien Regresi
Constant	7.382
Pendapatan Asli Daerah	5.400
Dana Perimbangan	.153

Secara matematis model fungsi dari regresi Linier berganda diatas dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = 7,382 + 5,400 (X1) + 0,153 (X2) + E$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Perimbangan

E = Variabel Pengganggu (error term)

Ini berarti bahwa :

1. Konstanta (a)

Konstanta sebesar 7,382 meyakinkan bahwa jika seluruh variabel independen bebas sama dengan nol (0) maka jumlah Belanja Daerah yaitu sebesar 7,382 %.

2. Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah memiliki nilai koefisien sebesar 5,400 %. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan tingkat Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 1%, maka jumlah Belanja Daerah akan meningkat sebesar 5,400 %. Koefisien bernilai positif berarti Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif atau searah dengan Belanja Daerah.
3. Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,153%. Artinya jika Variabel independen lain nilainya tetap dan tingkat Dana Perimbangan mengalami kenaikan 1%, maka jumlah Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,153%. Koefisien bernilai positif berarti Dana Perimbangan memiliki hubungan yang positif atau searah dengan Belanja Daerah.

5.3 Pembahasan

Beberapa pengujian yang telah dilakukan sebelumnya ternyata menunjukkan bahwa beberapa model regresi yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Banjarmasin sudah cukup baik. Dari hasil penelitian ini, di peroleh hasil bahwa dari variabel-variabel seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat koefisien konstanta sebesar 7,382 % atau berarti sebesar 7,382 Milyar yaitu berarti apabila nilai variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan sama dengan 0 (nol), maka jumlah

Belanja Daerah sebesar 7,382 Milyar. Koefesien secara keseluruhan menunjukkan mempunyai hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Perimbangan Berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, di karenakan pada tahun 2011 dan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar -2,24% maka dari itu hendaknya pemerintah Menggunakan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk belanja-belanja yang mampu meningkatkan pelayanan kepada publik.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang digunakan merupakan periode pengamatan.

5.4 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, yang membuat penelitian ini terbatas dan tidak begitu sempurna bisa dilihat dari pengaruh variabel bebas yang termuat dalam penelitian

ini saja tanpa melihat faktor lain yang mungkin saja mempengaruhi Belanja Daerah, kemudian data yang dianalisis pada penelitian ini yang hanya dalam kurun waktu 10 tahun serta wilayah penelitian yang hanya di Kota Banjarmasin. Kelemahan maupun kekurangan yang ditemukan setelah analisis dan interpretasi dalam penelitian ini merupakan data times series yang digunakan masih terlalu pendek sehingga mempengaruhi hasil signifikan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada BAB V, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya nilai R^2 dilihat dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah cukup tinggi yaitu 0,973. Dari nilai dapat kita lihat bahwa model yang dibentuk cukup tinggi dimana 97,3 persen variasi variabel jumlah Belanja Daerah dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel-variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Sedangkan 1,8 persen di jelaskan oleh faktor-faktor di luar model. Untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Banjarmasin maka diperlukan penelitian lebih lanjut.
2. Uji F-statistik menunjukkan semua variabel bebas dalam model regresi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan pada tahun 2007 s.d 2016 di kota Banjarmasin jika diuji secara bersama-sama atau serempak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Banjarmasin.
3. Dari hasil uji t menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Kota Banjarmasin di simpulkan bahwa taraf keyakinan yaitu 95 persen ($\alpha = 5$ persen), variabel Pendapatan Asli Daerah

signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan Variabel Dana Perimbangan tidak signifikan mempengaruhi Belanja Daerah.

4. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah tersebut. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Dana Perimbangan Berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, maka dari itu hendaknya pemerintah Menggunakan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk belanja-belanja yang mampu meningkatkan pelayanan kepada publik.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang digunakan merupakan periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (1997). *pengelolaan keuangan daerah*. yogyakarta : pt indeks.
- Cardiman. (2006). strategi belanja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat . In cardiman.
- Halim. (2001). *manajemen keuangan daerah*. yogyakarta: upp amp.
- Hariyanto, B. (2005). Bambang Hariyanto, (2005), *Esensi-esensi Bahasa Pemrograman JAVA*. bandung.
- Mangkosoebroto. (1993). *Ekonomi Publik*. In *Ekonomi Publik, Edisi-III*. Yogyakarta.
- Rahmawati. (2010). Pengaruh SDM dan Pemanfaatan. . In *Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan ketepatanwaktuan Pelaporan*.
- Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep, Permasalahan Dalam Aplikasinya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Badan Pusat Statistik, 2014. Jawa Tengah Dalam Angka. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah
- Bambang Kustianto, 2007. *Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol (14) (2) 25-36.
- Boediono, 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Pokok – Pokok Materi Statistik 2 : Statistik Inferensif*. Jakarta Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Laili, Nur. 2007. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DIY 1990-2004*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII.

Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : Erlangga.

Boediono, 1992, *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPF.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Gujarati, Damodar N, 1993, *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Gujarati, Damodar N, 1995, *Basic Econometrics, Third Edition*, Singapore: McGraw Hill Book. Co.

_____, 2009, *Basic Econometrics, Fifth Edition*, Singapore: McGraw Hill Book. Co.

Irawan, Suparmoko M., 1992, *Ekonomika Pembangunan*, Edisi Kelima, Yogyakarta: BPF.

Jhingan, M.L., 1993, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lampiran 1

Tahun	Belanja Daerah (rupiah)	Kenaikan	%
2007	203.996.58	203.597.54	1,38
2008	487.549.12	30.609.71	6,23
2009	518.158.83	38.343.00	7,40
2010	519.445.00	1.286.17	2,54
2011	557.788.00	125.386.16	2.24
2012	683.174.16	34.956.87	5,11
2013	718.131.03	248.866.97	3.46
2014	966.998.00	402.263.00	4,16
2015	1.369.261.00	100.156.92	7,41
2016	1.469.417.92	-	2,62

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Banjarmasin

tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
2007	45.572.94
2008	62.555.36
2009	64.994.80
2010	67.765.38
2011	57.007.00
2012	84.830.64
2013	104.679.00
2014	138.086.00
2015	216.427.65
2016	225.821.05

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Lampiran 2

Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)
2007	394.693.21
2008	445.675.86
2009	509.325.68
2010	570.350.78
2012	442.371.00
2013	664.770.00
2014	548.643.00
2015	758.384.00
2016	842.336.75

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Lampiran 3

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,986 ^a	,973	,966	8207373,11227	1,354

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1934001272113 4188,000	2	9670006360567 096,000	143,555	,000 ^b
	Residual	5388877872325 59,500	8	6736097340406 9,940		
	Total	1987890050836 6748,000	10			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7382024,753	12056462,914		,612	,557		
	Pendapatan Asli Daerah	5,400	1,014	,915	-5,327	,001	,115	8,702
	Dana Perimbangan	,153	,346	,076	,441	,671	,115	8,702

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Lampiran 4

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan
	1	2,849	1,000	,00	,00	,00
1	2	,144	4,450	,16	,10	,00
	3	,007	19,987	,84	,90	1,00

a. Dependent Variable: Belanja Daerah